

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas

A.1. Pengertian Pelanggaran

Menurut KBBI pengertian dari pelanggaran/*pe-lang-gar-an/n* perbuatan (perkara) melanggar; tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.⁵ Dapat dilihat bahwa pelanggaran juga dijatuhkan sanksi mengingat pelanggaran adalah perbuatan melanggar hukum yang bisa dikatakan tindak pidana akan tetapi tingkatannya lebih ringan daripada kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman pidana yang berat.

Dalam definisinya menurut para ahli, pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.⁶ Jadi pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang. Tidak bisa dijatuhi sanksi atau dikatakan telah melakukan pelanggaran pada seseorang apabila tidak ada aturan yang melarangnya.

Kemudian, ada yang mengemukakan bahwa, pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-undang sebagai hal yang terang atau pelanggaran merupakan perbuatannya oleh undang-undang dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Jadi, pelanggaran

⁵ <https://kbbi.web.id/langgar> diakses pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 20.31

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 71.

adalah delik undang-undang bukan delik hukum.⁷ Dianggap mengganggu ketertiban umum disini juga merupakan perbuatan pelanggaran. Dimana ketertiban umum ini mengerucut kepada ketertiban berlalu lintas seperti yang penulis fokuskan. Dalam hal ini semakin ditegaskan bahwa pelanggaran merupakan perbuatan melanggar hukum seperti menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁸

Pelanggaran dalam hal ini tidak sama dengan kejahatan seperti hal yang dikemukakan oleh Soekanto mendeskripsikan pelanggar lalu lintas sebagai masyarakat yang lalai: “Siapakah pelanggar lalu lintas? Jawabannya bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum harus menyadari bahwa pelanggar aturan lalu lintas (dalam kebanyakan hal) bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa. Sudah tentu bahwa penegak hukum harus selalu siap menghadapi kenyataan, apabila pelanggar ternyata adalah penjahat yang sedang melarikan diri. Akan tetapi, pada umumnya pelanggar adalah warga masyarakat yang lalai, oleh karena mengambil keputusan yang keliru”.⁹

Kemudian ada juga maksud dari pelanggaran yang dikemukakan para ahli hukum lain yakni, pelanggaran ialah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang

⁷ *Ibid*, hal 20-21.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung : Refika Aditama, 2003) hlm.33.

⁹ <https://lib.unnes.ac.id/2119/1/5161.pdf> diakses pada tanggal 12 November 2019 pukul 09.13 WIB

merumuskannya sebagai delik.¹⁰ Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹¹ Dari berbagai pengertian yang telah disebutkan, maka dapat mengambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran disini yang penulis soroti ialah mengacu kepada pelanggaran lampu lalu lintas yang berada di wilayah hukum Kota Malang.

A.2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Sudah seharusnya pelanggaran lalu lintas di Indonesia menjadi fokus dari aparat kepolisian. Karena pelanggaran lalu lintas di Indonesia sudah memilukan dan cukup banyak yang menimbulkan kecelakaan. Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹² Berpijak pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.¹³

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hal 101

¹¹ *Ibid* hal 101 - 102

¹² <http://digilib.unila.ac.id/9705/12/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 17.25 WIB

¹³ *Ibid.*

Pelanggaran lalu lintas memang sudah selayaknya menjadi sorotan dalam setiap tugas polisi khususnya polisi lalu lintas agar terciptanya masyarakat yang tertib dalam berkendara. Seperti yang ada dalam buku Vademikum Polantas yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang - undangan lalu lintas dan atau peraturan lalu lintas baik yang menimbulkan atau tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda tetapi dapat mengganggu kamtibmas Lantas.¹⁴ Dari uraian singkat ini maka memang perlunya peningkatan dari aparat penegak hukum mengenai pelanggaran – pelanggaran yang ada. Kemudian juga ada pengertian mengenai pelanggaran lalu lintas, Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan – ketentuan peraturan perundang – undangan lalu lintas jalan atau peraturan perundang – undangan lainnya.¹⁵

Kecondongan masyarakat untuk terus melakukan pelanggaran kebanyakan disebabkan karena minimnya kesadaran akan kepatuhan pada hukum utamanya pada peraturan perundang – undangan mengenai lalu lintas. Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas atau perbuatan tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan per-undang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32(1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan atau peraturan perundang-

¹⁴ https://www.academia.edu/11548278/PENGERTIAN_HKM_LALU_LINTAS?auto=download diakses pada tanggal 24 November 2019 pukul 15.40 WIB

¹⁵ *Ibid.*

undangan yang lainnya.¹⁶ Definisi pelanggaran lalu lintas yang tersebut diatas ternyata masih menggunakan dasar perundang – undangan yang lama, akan tetapi hal tersebut dapat dijadikan suatu masukan berharga dalam membahas tentang pengertian pelanggaran lalu lintas.

A.3. Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Di Indonesia pelanggaran lalu lintas bisa dikatakan sudah menjadi hal yang sangat populer terjadi. Hal itu disebabkan banyaknya pengendara yang terkesan menganggap pelanggaran lalu lintas merupakan hal yang biasa saja dan aturan lalu lintas dianggap peraturan yang apabila dilanggar tidak akan terlalu berat sanksinya. Pelanggaran lalu lintas di Indonesia semestinya wajib disoroti lebih serius mengingat banyaknya bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Karena, fungsi utama polisi lalu lintas adalah untuk mengatur ketertiban lalu lintas dan menjamin keamanan lalu lintas.¹⁷ Dapat dilihat dari banyaknya macam pelanggaran lalu lintas maka inilah klasifikasi bentuk – bentuk pelanggaran lalu lintas digolongkan dalam tiga golongan berikut ini :¹⁸

- a. Pelanggaran lalu lintas berat, seperti melanggar batas kecepatan, tanda pengatur lalu lintas, ketentuan menaikkan atau menurunkan penumpang, batas muatan, dan trayek.
- b. Pelanggaran lalu lintas biasa, seperti memutar atau membelok, ketentuan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau SIM, dan melanggar tanda larangan masuk pada jam tertentu.

¹⁶ <https://www.coursehero.com/file/phos5e6/C-Pengertian-Pelanggaran-Lalu-Lintas-JalanMenurut-Awaloedin-bahwa-pelanggaran/> diakses pada tanggal 24 November 2019 pukul 15.50 WIB

¹⁷ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, (Bandung: CV.Utomo, 2003), Hal. 111

¹⁸ Farouk Muhammad, *op.cit.*, Hal 12

c. Pelanggaran lalu lintas khusus dan ringan, seperti berhenti di jalur lalu lintas, sementara masih ada tempat di luar jalur, melanggar garis batas berhenti, dan meninggalkan kendaraan dalam keadaan mesin masih hidup.¹⁹

Sehubungan dengan bentuk – bentuk pelanggaran lalu lintas yang dikemukakan diatas. Penulis lebih memusatkan pada pelanggaran lalu lintas biasa karena berdasarkan yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat penulis yakni melanggar lampu lalu lintas dimana pelanggaran tersebut termasuk dalam bentuk pelanggaran lalu lintas biasa. Meskipun termasuk dalam pelanggaran lalu lintas biasa akan tetapi tetap harus ditindak tegas supaya tidak menjadi kebiasaan dari para pengendara. Oleh karena itu wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan dalam masyarakat.²⁰ Hal itu menyebabkan adanya sinergi antara bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi dengan petugas lapangan yang sedang berjaga di pos polisi. Sistem tanggung jawab pekerjaan harus dilaksanakan secara tegas, dilengkapi oleh penilaian yang diklasifikasikan dan perlombaan untuk meningkatkan efisiensi pengawasan lalu lintas.²¹

Sehubungan dengan penggolongan jenis pelanggaran tersebut, kepada petugas lapangan juga diberikan petunjuk sebagai berikut :²²

a. Penindakan Tilang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hal. 5

²¹ Untung S. Rajab *op.cit* hal 111

²² Farouk Muhammad, *op.cit.*, hal 12

Tindakan ini diberikan jika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas berat, misalnya mengemudikan kendaraan berliku – liku dan terlalu cepat atau dengan cara yang dapat membahayakan keamanan lalu lintas atau merusak jalan.

b. Penindakan dengan teguran

Tindakan ini diberikan jika pelanggar melakukan pelanggaran ringan, misalnya melanggar garis tanda berhenti, marka jalan.²³

Pelanggaran lalu lintas memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Tidak bisa hanya menyerahkan tugas tersebut kepada anggota kepolisian satuan lalu lintas. Inilah beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi :²⁴

- a. Menerobos Lampu Merah
- b. Tidak menggunakan Helm
- c. Melanggar rambu - rambu lalu lintas
- d. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara
- g. Tidak menggunakan Spion

Dengan banyaknya contoh pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi ini menjadi tolak ukur dari dampak tindakan kepolisian terhadap setiap pelanggar. Untuk melihat apakah suatu peraturan hukum berlaku atau tidak, masyarakat cenderung melihat pada sikap polisi, jika polisi sering kali menindak pelanggaran atas suatu peraturan, berarti hukum tersebut berlaku.

²³ *Ibid* hal. 13

²⁴<https://nasional.sindonews.com/read/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-seringterjadi-1420695422> diakses pada tanggal 24 November pukul 15.26 WIB

Akan tetapi, jika tidak menindak, mereka menganggap peraturan tersebut tidak berlaku.²⁵

Ketertiban dalam berlalu lintas adalah salah satu disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap masyarakat wajib hukumnya untuk turut merealisasikannya. Sebagai generasi muda sudah sepatutnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas, masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A.4. Pelanggaran lampu lalu lintas

Pada faktanya, pelanggaran lampu lalu lintas masih sering dilakukan sedangkan mengingat dampak dari pelanggaran lampu lalu lintas sangat besar. Yakni dapat menyebabkan kecelakaan apabila ada pengendara yang nekat menerobos lampu lalu lintas yang seharusnya berhenti. Pelanggaran terhadap lampu lalu lintas sendiri sudah tertera jelas dalam Pasal 106 Ayat 4 Undang – Undang LLAJ. Pasal 106 ayat 4 yang dimaksud diatas berbunyi sebagai berikut : *setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:*

- a. rambu perintah atau rambu larangan;*
- b. Marka Jalan;*
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;*
- d. gerakan Lalu Lintas;*
- e. berhenti dan Parkir;*

²⁵ Farouk Muhammad, *op.cit.*, hal 46

f. peringatan dengan bunyi dan sinar;

g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau

h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Penulis utamanya menyoroti Pasal 106 ayat 4 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni huruf c dikarenakan yang menjadi latar belakang dari penulisan hukum ini ialah para pelanggar lalu lintas yang melanggar *Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas* berupa lampu lalu lintas.

B. Tinjauan Umum Mengenai Lampu Lalu Lintas

B.1. Pengertian Lampu Lalu Lintas

Lampu lalu lintas (menurut UU no. 22/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan: alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL) adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat arus lalu lintas lainnya.²⁶ Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada.²⁷ Warna lampu yang diakui dan digunakan secara universal diseluruh kota di dunia untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan.

²⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_lalu_lintas diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 22.00 WIB

²⁷ *Ibid.*

Lampu lalu lintas disini melahirkan satu kesatuan peralatan pengatur lalu lintas yang menggunakan tenaga listrik kecuali rambu, marka jalan, dan lampu kedip untuk mengarahkan atau memperingatkan pengemudi kendaraan bermotor, pengendara sepeda atau pejalan kaki guna menerapkan keteraturan berlalu lintas dengan baik dan benar yang sesuai amanat dari undang – undang yang berlaku. Karena pemasangan lampu lalu lintas dan rambu yang sudah ada tidak semena – mena dipasan dan hal itu sudah disiapkan serta dipertimbangkan dengan matang oleh seperangkat aparat yang terlibat. Setiap pemasangan lampu lalu lintas bertujuan untuk satu atau lebih fungsi - fungsi sebagai berikut :²⁸

1. mendapatkan gerakan lalu lintas yang teratur,
2. meningkatkan kapasitas lalu lintas pada perempatan jalan,
3. mengurangi frekuensi jenis kecelakaan tertentu,
4. mengkoordinasikan lalu lintas dibawah kondisi jarak sinyal yang cukup baik, sehingga aliran lalu lintas tetap berjalan menerus pada kecepatan tertentu,
5. memutuskan arus lalu lintas tinggi agar memungkinkan adanya penyeberangan kendaraan lain atau pejalan kaki,
6. mengatur penggunaan jalur lalu lintas,
7. memutuskan arus lalu lintas bagi lewatnya kendaraan darurat (Ambulance) atau pada jembatan gerak.

Ciri – ciri fisik lampu lalu lintas adalah :²⁹

1. sinyal modern yang dikendalikan oleh listrik,

²⁸ <http://e-journal.uajy.ac.id/3387/3/2TS09707.pdf> diakses pada tanggal 13 November 2019 pukul 22.34 WIB

²⁹ *Ibid.*

2. setiap unit terdiri dari lampu merah, kuning dan hijau yang terpisah dengan diameter 8-12 inch (20,4-30,4 cm),
3. lampu lalu lintas dipasang diluar batas jalan atau digantung diatas persimpangan jalan. Tinggi lampu lalu lintas yang dipasang pada tiang adalah 8-15 ft (2,4-4,6 m) diatas trotoar atau diatas perkerasan bila tidak ada trotoar.

C. Tinjauan Umum Mengenai Penegakan Hukum

C.1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang seharusnya ataupun yang dipebolehkan dan sebaliknya.³⁰ Perbuatan yang sudah sesuai dengan hukum yang berlaku tidak akan menjadi masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang dengan sengaja untuk melawan hukum.³¹ Bahkan memang sudah sepatutnya untuk perbuatan – perbuatan yang melawan hukum tersebut menjadi perhatian dan mendapat pantauan penuh dari aparat penegak hukum. Karena jika aparat kepolisian tidak menindak tegas hal tersebut maka ditakutkan banyak masyarakat yang menganggap remeh pelanggaran terhadap hukum tersebut.

Secara konsepsional, arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan di dalam kaidah - kaidah yang mantap dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

³⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Pt. Alumni, 2010) hal.111

³¹ *Ibid.*

pergaulan hidup.³² Oleh karena itu, penegakan hukum dengan lingkungan akan bertukar aksi, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, social, budaya, politik dan sebagainya. Jadi, berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat memengaruhi penegakan hukum.

Pada dasarnya punya pandangan tentang apa yang baik dan yang buruk ada di dalam pergaulan hidup manusia. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terealisasi di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.³³ Dalam bidang hukum tata negara Indonesia, ibaratnya terdapat kaidah yang berisikan perintah untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukannya. Suatu proses penerapan efektifitas hukum yang menyangkut keputusan yang secara ketat diatur oleh kaidah hukum disebut sebagai penegakan hukum. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata – mata berarti pelaksanaan perundang – undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.³⁴

Penambahan sarana, dana, dan prasarana dalam perangkat proses penegakan hukum perlu terus diselenggarakan oleh pemerintah, hal ini mencegah timbulnya biaya yang memberatkan masyarakat yang terlibat

³² Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.5.

³³ *Ibid* hal. 6.

³⁴ *Ibid* hal. 7

proses penegakan hukum tersebut.³⁵ Ada juga pernyataan yang terkandung dalam salah satu laporan Seminar Hukum Nasional ke IV tahun 1979 yang menyatakan : “Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945”.³⁶

Dalam pendapat lainnya, Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara merupakan penegakan hukum. Dalam arti luasnya, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Artinya, siapa saja yang menjalankan aturan yang sudah ada atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti secara otomatis sudah menegakkan aturan hukum. Sedangkan jika dilihat dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu, apabila diperlukan dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁷

Kalau dilihat secara seksama, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Akan tetapi, kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan diatas, maka penegakan

³⁵ Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996) hal. 6

³⁶ Barda Nawawi Arief, *op.cit* hal. 8

³⁷ Jimly Asshiddiqie, <https://s3.ama-zonaws.com>, *Penegakan Hukum*, diakses pada 24 November 2019 pukul 21.30 WIB.

hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang – undang, hakim, instansi pemerintahan (bestuur), aparat eksekusi pidana.³⁸ Bukankah mereka ini memiliki peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya? Akan tetapi uraian selanjutnya akan membatasi diri pada penegakan hukum di bidang hukum pidana. Penegakan hukum di bidang ini didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang – bidang lainnya. Mengupas masalah penegakan hukum disini tidak mempersoalkan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah – masalah dalam penegakan hukum.

Membicarakan masalah penegakan disini tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam menghadapi masalah – masalah dalam penegakan hukum.³⁹ Nyatanya penegakan hukum tidak bisa semena – mena dijalankan apabila tidak memiliki aparat penegak hukum yang kuat dan tegas. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara materiil dalam melaksanakan tugasnya. Ini berarti, peningkatan “wibawa penegakan hukum” harus ditekankan pada makna penegakan hukum secara materiil.⁴⁰ Pemaknaan penegakan hukum seharusnya memang sudah menjadi poin penting utamanya pada aparat penegak hukum. Dimana penegakan hukum yang tegas dan baik akan secara tidak langsung membuat masyarakat menganggap bahwa hukum adalah hal yang harus dipatuhi. Hal itu secara

³⁸ Sudarto, *op.cit* hal. 112

³⁹ *Ibid* hal 113

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *op.cit* hal 8

otomatis akan meningkatkan kesadaran hukum di hati masyarakat bahwa melanggar aturan hukum yang berlaku bisa merugikan dirinya sendiri bahkan orang lain.

C.2. Faktor – Faktor Penegakan Hukum

Berdasarkan penjelasan – penjelasan diatas maka kita dapatkan bahwa masalah mendasar penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang mungkin mempengaruhinya. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Karena penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, berikut faktor – faktor yang mempengaruhinya, adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang – undang saja. Mengenai berlakunya undang–undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang–undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, supaya undang–undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif.⁴² Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum, dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum

⁴¹ Soerjono Soekanto, *op.cit* hal 8

⁴² *Ibid.*, hal 11-12

yang harus dijalankan tersebut dibuat.⁴³ Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang – undang, ialah ketidakjelasan di dalam kata – kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal – pasal tertentu.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.⁴⁴ Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan – kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.⁴⁵ Ruang lingkup penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.⁴⁶ Selaras dengan tugas akhir penulis, dimana Polisi Lalu Lintas (Polantas) merupakan penegak hukum dari undang – undang khususnya yang mengatur tentang lalu lintas maka Polisi Lalu Lintas memegang peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum tersebut.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan

⁴³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hal. 25

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit* hal 8

⁴⁵ *Ibid.*, hal 34

⁴⁶ Abintoro Prakoso, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019) hal.44

seterusnya.⁴⁷ Kalau hal – hal itu tidak terpenuhi, maka tidak mungkin penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.⁴⁸ Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat yang oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁴⁹ Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya, struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.⁵⁰

Faktor masyarakat juga berperan penting dalam hal pelanggaran lampu lalu lintas, mengingat budaya melanggar jika tidak ada polisi yang berjaga di tengah perempatan atau pertigaan masih belum bisa diminimalisir. Kesadaran diri tentang keamanan diri sendiri dan orang lain seakan dikesampingkan karena sudah menjadi kebiasaan jika tergesa - gesa maka langsung saja menerobos lampu merah. Itulah yang dapat menjadi penghambat sulitnya penegakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas khususnya di Kota Malang.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit* hal 37

⁴⁸ *Ibid.*, hal 8

⁴⁹ *Ibid.*, hal 45

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *op.cit* hal 31

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵¹ Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.⁵² Kelima faktor tersebut di atas memiliki keterkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan hakikat dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada penegakan hukum.

D. Penanggulangan Tindak Pidana atau Kejahatan

D.1. Pengertian Penanggulangan Tindak Pidana

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan – tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.⁵³ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.⁵⁴ Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari

⁵¹ Soerjono Soekanto, *op.cit* hal 8

⁵² *Ibid.*, hal 60

⁵³ Sudarto, *op.cit* hal 113

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana, 2010) Hal. 28

kejahatan. Jika prevensi diartikan secara luas, maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang – undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparat eksekusi pidana serta orang – orang biasa.⁵⁵

Dalam arti yang lebih luas yakni merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum. Sedangkan jika ditarik dalam arti yang paling luas ini merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang – undangan dan badan – badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma – norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma – norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan.⁵⁶ Proses pemberian pidana dimana badan – badan ini masing – masing mempunyai karakter sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

D.2. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Bahwa menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :⁵⁷

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);

⁵⁵ Sudarto, *op.cit* hal 113

⁵⁶ *Ibid* hal 114

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *op.cit* hal 41-42

- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society in crime and punishment/mass media*).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor – faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah – masalah atau kondisi – kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.⁵⁸

Fungsi preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga – lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang – orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan – perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.⁵⁹ Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Secara sederhana, konsep ini bertujuan menumbuhkan inisiatif masyarakat setempat guna mencegah dan menanggulangi kejahatan di wilayahnya, tanpa sepenuhnya mengandalkan kepada polisi.⁶⁰

Usaha penanggulangan kejahatan secara preventif atau pencegahan pada hakikatnya bukan hanya bidang dari aparat penegak hukum yakni kepolisian saja. Penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Untung S. Rajab *op.cit* Hal 162

⁶⁰ Prija Djatmika, *Membangun Polisi Sipil Bersama Masyarakat*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), Hal. 25

tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.⁶¹ Seperti contoh yang dapat disaksikan di Kota Malang di persilangan jalan yang ada lampu lalu lintasnya. Meskipun disitu ada pejabat polisi yang menjaga, namun apabila ia tidak pernah menegur atau mengambil tindakan terhadap orang yang melanggar tanda berhenti (merah), maka pelanggaran akan terus berlangsung.⁶²

Masalah yang perlu mendapat sorotan ialah sampai seberapa jauh polisi dapat bertindak dalam menegakkan hukum, khususnya pencegahan kejahatan? Apakah yang dapat ia lakukan dalam menunaikan tugas ini? Batasnya yang diberikan oleh undang – undang (Undang – Undang No. 13 tahun 1961), ialah bahwa “kepolisian negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak – hak asasi rakyat dan hukum negara”.⁶³ Demi tegaknya norma – norma hukum, inilah yang menjadi dasar mengapa pencegahan kejahatan perlu untuk dilakukan aparat penegak hukum. Khusus dalam hubungan dengan pekerjaan kepolisian, pembatasan-pembatasan tersebut berupa kontrol terhadap keleluasaan polisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada pemeliharaan ketertiban atau untuk menghentikan kejahatan.⁶⁴

D.3. Upaya Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, “*Criminal Law*” dan “*Penal Policy*”, dikemukakan olehnya bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu

⁶¹ Sudarto, *op.cit* hal 114

⁶² *Ibid* hal 115

⁶³ *Ibid* hal 116

⁶⁴ Satjipto Raharjo, *op.cit* hal 114

sekaligus seni yang pada ahirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang – undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang – undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶⁵ Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang – undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat.⁶⁶ Ada dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan :⁶⁷

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan hukum pidana dalam menangani dua masalah sentral diatas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.

Sejatinya kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.⁶⁸ Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 2010, *op.cit* hal 21

⁶⁶ *Ibid.*, hal 28

⁶⁷ *Ibid.*, hal 30

⁶⁸ *Ibid* hal. 4

kesadaran si pelanggar akan nilai – nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.⁶⁹ Gunanya yakni akan menciptakan kesadaran lebih besar akan tertibnya berlalu lintas. Sudah semestinya tertib berlalu lintas terjadi di tengah – tengah masyarakat yang semakin banyak ini. Karena apabila terus menerus dibiarkan atau terkesan penegakannya lemah maka hal itu menyebabkan stigma masyarakat yang akan menganggap remeh tertibnya berlalu lintas. Padahal jika ditarik sisi positif dari tertib berlalu lintas sangat banyak yang salah satunya yakni secara otomatis akan mengurangi angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia.



⁶⁹ *Ibid* hal. 38